

PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR DALAM PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK

Oleh :

Rijal¹, Salehuddin²

rijalbudiman020390@gmail.com

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS BIAK^{1,2}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak dalam Prespektif Pelayanan Publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang berarti bahwa penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena dan masalah yang dialami pada subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, DPRD Komisi Tiga, Pengusaha Hotel, Masyarakat dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Objek Pariwisata di Kabupaten Biak dalam Prespektif Pelayanan Publik belum maksimal. Dilihat dari bentuk dan model strategi pengembangan yang dilakukan dalam prespektif pelayanan publik seperti Responsiviness, Responsibility, Acountability belum diterapkan dengan baik. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya diterapkan model pengembangan objek pariwisata secara kolaboratif untuk mempermudah pelayanan publik dalam pengembangan pariwisata dan perlu adanya regulasi yang mengikat dalam pengembangan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pengembangan, Pariwisata, Pelayanan Publik

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 10 Tahun 2009 perihal kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas serta layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah itu sendiri. Pariwisata adalah semua kegiatan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat supaya mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan dari wisatawan. (Flo, 2018) Sektor pariwisata sudah terbukti mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi secara nasional sebagai industri perolehan devisa. Oleh karenanya dengan pengelolaan yang

tidak meninggalkan kearifan lokal, dapat berindikasi pada terbangunnya sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan syarat pertama memiliki keunikan atau identitas daerah tersebut, kedua tempat wisata memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan, ketiga dukungan dari pemerintahan daerah dan masyarakat setempat. Sebagaimana yang dikemukakan (Subardin et al., 2010, p. 16) beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagai destinasi wisata yaitu daya tarik, aksesibilitas, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Jika kita lihat potensi Pariwisata Kabupaten Biak sangat menarik dan tidak kalah dengan daerah lain, namun pada

kenyataannya mereka dihadapkan dengan masalah lain adalah 1) Terbatasnya SDM yang profesional di bidang Pariwisata, 2) Terbatasnya Ketersediaan Anggaran, 3) Sarana dan Prasarana kurang memadai, 4) Kurangnya sinergitas antar sektor, 5) Terbatasnya Data dan Informasi, 6) Belum Optimalnya Pemanfaatan SDA Daerah dan Seni Budaya Daerah, 7) Tentang Tanah Adat (Hak Ulayat), hal ini sangat menghambat pembangunan sarana dan prasana Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor.

Terkait hal itu, pemerintah sebagai pemegang wewenang utama tentu sangat perlu memahami hakikat dari pengembangan pariwisata dalam konteks ini, diantaranya adalah dengan melakukan optimalisasi fungsi administrasi yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, dan kemampuan pelayanan yang baik untuk wisatawan. Kajian (Pramadany, 2013, p. 136) menyatakan, sektor dari pariwisata dibutuhkan suatu strategi pola pengembangan kepariwisataan yang tersusun dupaya potensi bisa di kembangkan dengan maksimal. Potensi daerah menjadi aset terpenting untuk dapat tereksplorasi dengan baik, di mana daerah memiliki keunggulan budaya, keunggulan sumber daya alam sehingga pesonanya dapat menjadikan pariwisata sebagai tuan rumah dalam meningkatkan perekonomiannya.

Berbagai potensi dari obyek wisata di daerah Kabupaten Biak Numfor sangat menjanjikan dalam mendatangkan berbagai turis untuk mengunjungi Biak," ujar Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Boy Ronsumbre di Biak, Selasa (15/4/2014). Beliau telah mengakui, obyek dari tempat wisata Biak Numfor yaitu taman laut Padaido, aset sejarah peninggalan Perang Dunia II, keindahan pantai dan beragam

jenis budaya tarian daerah Papua dapat menjadi daya tarik wisata. "Sektor pariwisata Biak Numfor dapat dijadikan andalan daerah agar dapat menyumbang penerimaan pendapatan daerah. Namun hal tersebut dalam pengembangannya belum terlihat secara baik, karena objek wisata tersebut tidak dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah itu sendiri, disamping itu peningkatan sumber daya manusia itu sendiri belum memadai.

Berdasarkan Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disesuaikan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan dari penyelenggara pelayanan publik. Dijelaskan Rivai (Agustina, 2016, p. 7), yaitu: 1) Terdapat peran dalam jiwa pemimpin yaitu dengan melakukan usaha adalah mengerjakan segala sesuatu. Sehingga disesuaikan dengan visi dan misi daerah tersebut, dan 2) Terdapat suatu peran dalam mengatur yang tentunya dalam melakukan sesuatu sesuai tupoksinya secara faktual dalam pelaksanaannya. Dalam kajian (Rusyidi & Fedriyansah, 2018) menjelaskan Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan masyarakat (*the community approach*). Pendekatan ini menekankan pada pelibatan penuh kepada masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata. (Barata, 2003) menjelaskan terdapat 4 unsur dalam proses pelayanan publik, yaitu : a) penyedia layanan, adalah suatu pihak yang memberikan sesuatu, b). Penerima layanan, adalah mereka yang disebut konsumen (*costumer*), c). Jenis layanan, yaitu layanan yang diberikan oleh penyedia layanan terhadap pihak yang

membutuhkan dari suatu layanan, d). Kepuasan pelanggan, adalah tingkat kepuasan dari pelanggan yang berkaitan dengan standar dari kualitas barang ataupun jasa.

Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) mengemukakan bahwa selain tepaku pada analisis kebutuhan, pengembangan dalam memusatkan perhatiannya juga membahas tentang berbagai isu luas perihal analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan dalam konteks ini memiliki tujuan supaya menghasilkan suatu produk berdasarkan berbagai temuan yang didapat di lapangan. Oleh karena itu apapun konsep pengembangannya hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :1). Lingkungan ; sektor pariwisata perlu memiliki tingkat keramahan lingkungan yang tinggi. 2) Kebudayaan ; sektor pariwisata dalam konteks budaya, bukan budaya dalam konteks pariwisata. Sehingga jangan sampai berbagai warisan budaya menjadi di komersialkan untuk kepentingan sektor pariwisata. Kegiatan sector pariwisata harus mendukung perihal konservasi dan preservasi kebudayaan lokal. 3) Manusia ; peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dari suatu pendidikan ataupun latihan sehingga data bersaing secara global. Perlu juga diberikan kampanye kesadaran kepada masyarakat agar menjadi semakin mencintai kebudayaan dan ketahanan akan norma ataupun nilai sosial dari kemasyarakatan. Sehingga diharapkan mampu menyaring pengaruh inkulturasi, akulturasi dan asimilasi sebagai dampak dari kegiatan pariwisata. 4) Ekonomi Sosial ; pariwisata harus bisa meningkatkan kesejahteraan orang banyak. 5) Objek dan daya tarik wisata ; objek dan atraksi dari wisata harus mampu diidentifikasi,

dikembangkan, dirawat dan digunakan dengan berkesinambungan.

Untuk itu, kajian ini akan mengulas bentuk dan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor dengan mencermati dari aspek Pelayanan Publik. Kajian ini juga berbeda dari kajian yang lainnya, terutama dalam hal bagaimana mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Biak melalui strategi pengembangan sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Keunikan kajian ini adalah keberanian penulis untuk mengangkat penguatan sektor pariwisata tidak hanya dari tataran regulasi, namun bagaimana Kabupaten Biak dapat menciptakan inovasi di bidang pariwisata melalui penguatan regulasi dan manajemen pelayanan Publik pariwisata. Oleh karenanya tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan strategi untuk mengembangkan model pariwisata di Kabupaten Biak dalam perspektif pelayanan publik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pengembangan Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012)

pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke, 1996, p. 99)

2. Model Pengembangan Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah devisa negara maupun pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi, dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan daerah wisata hendaknya memperlihatkan tingkatnya budaya, sejarah dan ekonomi dari tujuan wisata.

Menurut (Rusyidi & Pratiwi, 2018) Menjelaskan bahwa model pengembangan pariwisata yang diusulkan dengan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat. Adapun model pengembangan pariwisata tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan, antara lain: tahap awal (*beginning*), tahap pertengahan (*middle*), dan tahap lanjutan (*advanced*).

3. Konsep Pelayanan Publik

Dalam Undang-undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009 (2009:12) dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lenvine dalam (Agus, 2008, p. 134) maka produk pelayanan publik di dalam negara demokratis setidaknya harus memenuhi tiga indikator, yaitu *responsiveness* adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. *Responsibility* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dan *accountability* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *Stakeholders* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Objek Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor dengan menggunakan suatu pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu makna dari berbagai masalah sosial (Ghony & Almanshur, 2018, p. 61). Adapun fokus pada penelitian ini yaitu Pengembangan Objek Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor dalam Perspektif Pelayanan Publik.

Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini yaitu orang yang

diwawancarai dan dimintai informasi oleh seorang pewawancara. Informan merupakan orang yang diperkirakan dapat menguasai dan memahami suatu data, informasi, ataupun fakta dari subjek objek penelitian (Bungin, 2007, p. 111), teknik penentuan informan dilakukan dengan cara teknik *purposive sampling* melalui *key person*, dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah dari suatu penelitian (Bungin, 2007, p. 107).

Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan yaitu observasi partisipan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dipakai oleh (Miles M.B & Huberman A.M, 2007, pp. 16–19) yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, meliputi: pengumpulan data; reduksi data; display dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan tiga strategi dalam melakukan validasi data yang meliputi pengamatan terus menerus, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat untuk membantu dalam pengumpulan data.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Biak Numfor adalah salah satu dari 29 Kabupaten/Kota di Propinsi Papua yang berada dalam Kawasan Teluk Cenderawasih dan terletak pada perairan Samudra Pasifik yang berbatasan dengan Kabupaten Supiori dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kabupaten Biak Numfor

merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Kepariwisata Nasional di Indonesia karena memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan untuk dipromosikan pada Skala Nasional maupun Internasional. Olehnya itu dapat dilihat dari obyek – obyek wisata di atas Dinas Pariwisata menetapkan 9 (Sembilan) Destinasi Unggulan sebagai prioritas dalam pengembangan obyek wisata. Adapun 9 Destinasi Unggulan dan 2 Destinasi Tambahan tersebut adalah; 1) Obyek Wisata Monumen Perang Dunia ke II. 2) Obyek Wisata Goa Jepang atau Goa Binsar. 3) Obyek Wisata Gua Wundi. 4) Obyek Wisata Catalina Point. 5) Obyek Wisata Pantai Wari. 6) Obyek Wisata Kuburan Tua Padwa. 7) Obyek Wisata Pulau Sember Pasi. 8) Obyek Wisata Tanjung Saruri. 9) Obyek Wisata Taman Burung. 10) Obyek Wisata Air Terjun Wafarak. 11) Obyek Wisata Wapsdori Warerfall.

Salah satu pendukung dalam potensi sektor pariwisata adalah hotel. Hotel mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk mengakomodasikan kedatangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan masyarakat, devisa Negara, dan membuka lapangan pekerjaan, yang nantinya berpengaruh pada sektor lain yang terkait seperti industry kerajinan rumah tangga, angkutan, komunikasi, pemandu wisata, biro/agen perjalanan wisata. Di bawah ini adalah tabel Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Biak Numfor dari tahun 2013 sampai 2019 sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013-2019**

TAHUN	WISATAWAN		JUMLAH
	Mancanegara	Domestik	
2013	2075	40400	42475
2014	1771	42366	44137
2015	3405	42780	46185
2016	1314	56557	57871
2017	973	55275	56248
2018	371	38621	38992
2019	1096	60123	61219

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor 2020

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada 2018 pengunjung mancanegara mengalami penurunan sangat drastis menjadi 371. Kemudian pada 2019 mengalami peningkatan kembali sebanyak 1096. Sedangkan Wisatawan Domestik setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 38621. Kemudian Tahun 2019 mengalami peningkatan drastis sebanyak 60123 pengunjung domestik. Hal tersebut merupakan hasil rekapitulasi data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik setiap bulan bersumber dari 15 hotel. Kunjungan wisatawan dari mancanegara (wisman) ataupun wisatawan nusantara (wisnus) setiap bulannya tidak menentu, kadang meningkat namun kadang menurun drastis. Lama kunjungan berkisar 3-4 hari, tetapi khusus wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut (wisata bahari) dapat tinggal selama 8 hari, atau lebih. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya diantaranya; pertama fasilitas. Pengelolaan yang benar terhadap sertiap obyek wisata sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan

kualitas dari sarana dan prasarana yang diperlukan pada tiap obyek wisata. Dengan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan arus dari kunjungan wisatawan. Sehingga dilihat dari sektor pariwisata dapat memberikan berkontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian.

Data tersebut diatas memberikan gambaran bahwa objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Biak Numfor dari dua Belas (12) Distrik yang ada dari berbagai nama dan jenis objek wisata bervariasi dari nama objek dapat dilihat terdapat wisata pantai, pulau dan museum sedangkan jenisnya ada wisata sejarah, alam bahari. Sedangkan daya tariknya tergantung pada nama objek wisata dari berbagai distrik, dan untuk aksesibilitasnya di sesuaikan dengan distrik serta jarak tempuh yang dilalui tergantung pada medan yang akan dikunjungi, untuk keterangan objek wisata dilihat dari keabsahan berdasarkan data bahwa rencana kerja yang akan dilakukan berdasarkan pada analisa objek wisata yang menonjol untuk diprioritaskan dilakukan pengembangan.

Pada dasarnya fasilitas yang tidak memadai menjadi penghalang sebuah daerah untuk maju pembangunannya. Pada

umumnya beberapa hal yang belum berjalan optimal dari pengembangan wisata di antaranya akses jalan, sarana, SDM, dan regulasi pariwisata (Itamar et al., 2014, p. 95) Selain itu, pengembangan destinasi pariwisata masih minim karena kurangnya perawatan pada setiap fasilitas yang ada, kurangnya pendidikan serta pelatihan yang dilaksanakan kepada pegawai dan pengelola yang ada di lapangan (Ervina, 2017, p. 6241) Hal itu menegaskan fasilitas yang terdapat di pariwisata menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung.

1. Bentuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Biak dalam Prespektif Pelayanan Publik.

Karena suatu produk dari pelayanan publik di dalam negara demokratis setidaknya harus memenuhi tiga indikator, yaitu *responsiveness* yakni daya tanggap dari penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan. *Responsibility* yakni suatu ukuran yang menunjukkan tingkat seberapa jauh proses pemberian layanan publik dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang tepat dan sudah ditetapkan. Dan *accountability* yakni suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *Stakeholders* dan norma - norma yang berkembang dalam masyarakat. Peneliti juga menambahkan temuan baru dalam Pengelola Obyek Wisata pada Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor bahwa salah satu Faktor penghambat belum tercapainya kinerja secara maksimal Dinas Pariwisata adalah Terbatasnya SDM yang profesional di bidang Pariwisata dalam hal Ekonomi Kreatif dan Strategi Pengembangan Pariwisata.

Lenvine dalam (Agus, 2008, p. 143). Sesuai dengan pendapat diatas, indikator

produk pelayanan publik yang menjadi acuan dalam penelitian ini maka penulis akan menggambarkan secara rinci terkait bentuk pengembangan pariwisata berdasarkan hasil temuan dilapangan dan kerangka konseptual sesuai dengan acuan teori dintinjau dalam konteks pelayanan publik dalam pengembangan pariwisata di kabupaten biak numfor.

a. *Responsiveness*

Berbicara mengenai *responsiveness* berarti kita melihat daya tanggap atau respon cepat yang dilakukan oleh pemberi layanan kepada yang membutuhkan layanan sesuai dengan keinginan yang diperlukan sesuai dengan konteks dan kemampuan yang harus dipenuhi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Olehnya itu sumber daya manusia yang dimiliki harus mampu memenuhi kriteria agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan memberikan solusi dari setiap permasalahan kepada pengunjung atau wisatawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa daya tanggap dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang ada di kabupaten biak numfor belum baik hal ini terjadi karena koordinasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dan swasta tidak efektif bahkan komunikasi yang dilakukan tidak terjadi dengan tepat sasaran. Sehingga hal tersebut menjadi problem yang serius karena masyarakat yang ada di sekitar wilayah destinasi wisata tidak terkontrol sehingga aturan yang diberlakukan tidak dihiraukan oleh masyarakat, untuk itu jika dilihat dari segi indikator *responsiveness* yakni

dengan memenuhi tuntutan wisatawan atau pengunjung dengan memberikan pelayanan yang baik seperti penyediaan sarana dan prasarana terlihat belum baik

b. *Responsibility*

Secara garis besar *responsibility* memiliki suatu peran yang penting dalam sektor pelayanan publik sehingga diperlukan komitmen dan integritas pemimpin dalam melakukan perencanaan dalam pengembangan pariwisata di kabupaten biak numfor, hal tersebut sangat penting karena untuk kepentingan dan peningkatan sumber daya dan pendapatan daerah tergantung daripada orang yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan pariwisata di kabupaten biak. Olehnya itu tanggung jawab harus lebih dicenderungkan agar terjadi kesadaran diri bahwa seluruh aspek yang akan dilakukan adalah untuk kepentingan bersama dalam membangun kabupaten biak melalui pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan belum maksimal. Terlihat dari suatu sarana dan prasarana yang ada belum memadai sehingga wisatawan akan merasa kurang nyaman saat berkunjung ke tempat pariwisata. Oleh karena itu *responsibility* sangat penting karena itu menjadi ukuran seberapa jauh pelayanan yang dilakukan atau diberikan kepada pengunjung atau wisatawan supaya dapat memberikan rasa kenyamanan dan keamanan sehingga timbul rasa kepuasan.

c. *Accountability*

Berbicara mengenai *accountability* maka dapat digambarkan bahwa perwujudan untuk mempetanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan media atau organisasi masing-masing. Artinya apa bahwa segala bentuk yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten biak melalui dinas pariwisata dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan baik secara administrasi agar serapan yang telah dilakukan dapat di evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan keberhasilan dan kegagalan dalam pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten biak numfor. Ukuran yang menunjukkan tingkat seberapa jauh proses pemberian dari layanan publik itu perlu dilakukan kesesuaian dengan berbagai administrasi dan organisasi yang tepat dan sudah ditetapkan akan terlihat kurang baik. Hal ini disebabkan sinergitas stakholder dalam membuat perencanaan tidak terkoordinasi dengan baik dan benar. Sehingga hal tersebut menjadi ukuran bahwa proses pemberian pelayanan publik tidak berjalan dengan baik disebabkan sinkronisasi dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah terhadap dinas pariwisata kepada pengelola, masyarakat dan pengusaha terhambat pada persoalan administrasi perencanaan dan estimasi anggaran yang akan dilakukan. Hasil observasi penulis

dilapangan ditemukan bahwa pemberian layanan publik yang dilakukan memang terhambat pada proses komunikasi yang dibangun oleh instansi pemerintahan dengan instansi yang lain sehingga proses kerjasama yang dilakukan tidak terkoordinir dengan baik. Sesuai dengan hasil kajian (Rijal, 2020) menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam pengelolaan objek wisata belum bekerja dengan baik. Pemerintah sebagai Motivator belum maksimal karena tidak adanya pelatihan dan pendidikan mengenai objek wisata, dan Pemerintah sebagai Regulator dilihat masih belum maksimal dalam menerapkan peraturan mengenai objek wisata dan pemerintah tidak melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka.

d. Regulasi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat memiliki kewajiban agar menjamin dalam berwisata sebagai hak dari setiap orang yang dapat ditegakkan sehingga dapat mendukung tercapainya suatu peningkatan harkat martabat manusia dan peningkatan kesejahteraan. Olehnya itu regulasi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengikat keteraturan pengembangan pariwisata di kabupaten biak numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan daerah yang dibentuk belum diberlakukan secara hukum, hal tersebut juga dilihat bahwa

keseriusan pemerintah dalam membuat regulasi masih kurang baik hal ini disebabkan komunikasi yang dibangun oleh stakheldor yang terlibat tidak instens terjadi, disamping itu pihak yang membuat aturan dalam hal ini DPRD kabupaten biak belum terlalu serius mendalami permasalahan-permasalahan pariwisata yang ada di kabupaten biak untuk dibuatkan regulasi yang jelas sebagai payung hukum untuk pengembangan pariwisata. (Pramadany, 2013) mengatakan, Kabupaten Nganjuk mengalami penghambatan pariwisatanya karena belum tersedianya peraturan daerah yang mengatur perihal suatu strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Contoh lain, Nurhadi, Mardyono, dan Rengu menemukan tiga strategi yang dilakukan Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pariwisata di daerah yaitu pengembangan obyek wisata, promosi wisata, dan pembinaan usaha pariwisata. Penegasan hasil kajian tersebut menggambarkan, pemerintah daerah tidak bisa berpaling untuk mengabaikan pariwisata yang ada di daerahnya

e. Stimulus Pariwisata

Stimulus pariwisata merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak tertekan akan tetapi dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah yang menjadi objek pariwisata. jika kita melihat fenomena yang terjadi pasca Covid 19 melanda seluruh dunia maka itu dapat menyebabkan tekanan

perekonomian semakin anjlok hal ini disebabkan roda perekonomian tidak berjalan dengan normal. Sehingga Pemerintah harus menyiapkan sejumlah stimulus pariwisata kepada pengelola objek wisata seperti di kabupaten biak numfor yang mempunyai nilai tersendiri untuk menekan laju perekonomian.

Hasil penelitian menunjukkan terhambatnya pengembangan pariwisata di kabupaten biak numfor adalah kurang tersedianya anggaran yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan.

f. *Tourist Destination*

Berdasarkan perencanaan tersebut diatas dapat dianalisa bahwa pemerintah kabupaten biak dalam hal ini dinas pariwisata sudah serius dalam meningkatkan penataan dan pengembangan untuk lima tahun kedepan dengan mulai melakukan penataan kawasan wisata yang menjadi unggulan kabupaten biak sebagai bahan untuk menarik wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri sebagai tempat tujuan yang akan dikunjungi. Hal ini perlu kajian dengan metode administrasi publik dengan sistem pelayanan publik yang terintegrasi sehingga koordinasi dapat terbangun untuk dilakukan pengembangan pariwisata di kabupaten biak Numfor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tujuan wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan hanya di dapatkan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, hal tersebut bahwa edukasi dan proses pemasaran yang dilakukan oleh dinas pariwisata belum nampak secara jelas terkait

dengan tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Jika kita mengacu pada perencanaan dan program wisata unggulan pemerintah terdapat sembilan jenis wisata yang menarik namun hal tersebut belum tercover kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pengusaha dalam melakukan pemasaran kepada publik. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan wisata (*Tourist Destination*) terlihat belum optimal dilakukan dalam segi pemasaran wisata, kurang efektifnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat bahwa ada wisata unggulan, tidak terjadinya kerjasama oleh pemerintah dalam memberikan layanan informasi kepada pengunjung wisatawan.

g. *Tourist Atraction*

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 perihal sektor kepariwisataan, Obyek wisata dan Atraksi Wisata tidak didefinisikan masing-masing secara terpisah, melainkan dalam satu definisi Daya Tarik Wisata (*Tourism Attraction, Tourist Attraction*), sebagai Daya Tarik Wisata yakni segala sesuatu yang memiliki ciri khas, keindahan dan nilai berupa suatu keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi toll ukur terhadap sasaran dari kunjungan wisatawan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa atraksi wisata memang sangat menarik dan banyak namun dalam pengembangannya belum maksimal, hal ini disebabkan karena pengelolaan secara administratif dalam pelayanan publik belum baik,

disamping itu juga pemerintah belum mampu mendeteksi permasalahan yang terjadi dilapangan terkait dengan keluhan-keluhan pengunjung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, oleh sebab itu pemerintah harus mampu lebih intens melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan atau fasilitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat oleh sebab itu, dukungan pemerintah dalam megambil kebijakan memiliki peran yang sangat strategis. Paling tidak seperti dijelaskan Rivai dalam (Agustina, 2016, p. 7), yakni: 1). Terdapat peran dalam kepemimpinan yaitu berusaha mengerjakan segala sesuatu yang benar dan harus sesuai dengan visi dan misi suatu daerah, dan 2) Terdapat peran mengatur dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tupoksinya secara tepat dalam pelaksanaannya.

h. Acomodation

Dalam penelitian ini penulis adalah akomodasi (*acomodation*) dalam pariwisata. akomodasi dalam pariwisata sangat identik dengan penginapan atau fasilitas yang dapat menampung wisatawan dalam memenuhi kebutuhan jika sudah melakukan kunjungan disetiap tempat wisata. jika kita mengkaji secara mendalam akomodasi yang dimaksud pada umumnya adalah tempat yang disediakan oleh penyedia jasa yakni agen travel yang mampu menyediakan fasilitas dan kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Oleh sebab itu di kabupaten Biak Numfor dengan

berbagai jenis pariwisata yang ada dapat kita lihat, maka seharusnya fasilitas pendukung yang mampu menyediakan kebutuhan wisatawan harus jelas dan terpenuhi seperti hotel, tempat makan, apartemen dan lain-lain yang menjadi pendukung sebagai akomodasinya.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa wisatawan yang melakukan kunjungan meningkat sehingga hal tersebut menandakan bahwa memang destinasi pariwisata yang ada di kabupaten biak numfor cukup menarik, sehingga mampu dikunjungi oleh wisatawan luar negeri maupun lokal. Namun terlihat pula bahwa akomodasi yang ada belum mempunyai standar kelayakan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang berkunjung ke kabupaten biak numfor. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akomodasi yang ada dan tersedia belum terlihat maksimal.

i. Transportasion

Transportasi dan akomodasi yakni dua bagian penting dalam sector pariwisata. Seperti halnya dalam pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya, maka alat transportasi dibutuhkan. Hal ini berkesinambungan dengan pengertian dari wisatawan yakni pengunjung yang menginap di daerah tujuan wisata, akan membutuhkan akomodasi.

Kabupaten Biak Numfor dilihat dari kondisi geografis maka dapat digambarkan bahwa jangkauan yang harus dilalui berbagai medan sesuai

dengan jarak tempuh untuk dilakukan kunjungan oleh wisatawan sehingga hal tersebut terlihat bahwa yang dibutuhkan adalah transportasi yang memadai seperti transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang penyediaan transportasi di kabupaten biak belum memadai, seperti penyediaan transportasi laut untuk membawa pengunjung ke tempat atau pulau yang dijadikan objek wisata yang akan dikunjunginya, disamping itu terlihat juga bahwa pengembangan yang dilakukan dalam infrastruktur belum maksimal.

j. *Shouvenir Shop*

Fungsi souvenir ini bagi tempat pariwisata sangat banyak, diantara sebagai bagian dari promosi tempat wisata, dan bisa juga menjadi kenang-kenangan bagi pengunjung atau wisatawan yang datang. Jika kita pergi ke tempat wisata tentu kita ingin membeli cendera mata yang asli menunjukkan ke khasan tempat wisata tersebut. Jika kita melihat khas kabupaten Biak numfor dengan berbagai macam suku yang ada maka sangat banyak souvenir yang perlu disajikan dan tergantung pada peran pemerintah itu sendiri dalam memberikan support kepada pengusaha dan masyarakat di kabupaten biak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shouvenir Shop* yang ada di kabupaten Biak penerapannya belum berjalan dengan baik dan belum maksimal, hal ini terlihat berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan ditemukan bahwa bentuk *shouvenir shop* yang ada di

kabupaten Biak numfor belum berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan evaluasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata tidak berjalan dengan baik. Kemudian jika kita lihat di kabupaten biak ini banyak yang perlu dikembangkan terkait dengan shouvenirnya itu sendiri karena itu merupakan salah satu opsi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

k. Pengembangan SDM

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di Kabupaten Biak Numfor beserta karakteristik atau cirri demografis, social maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi sumber daya manusia berarti membahas penduduk di Kabupaten Biak Numfor dengan segala potensi atau kemampuannya baik aspek kuantitas dan kualitasnya. Sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata dalam hal pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor, hal kritis yang terkait dengan pelayanan pemerintah pada sektor pariwisata adalah perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (SDM OAP), Pengelola Obyek Wisata pada Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor sehingga ditemukan bahwa Faktor penghambat belum tercapainya kinerja secara maksimal Dinas Pariwisata adalah Terbatasnya SDM yang profesional di bidang Pariwisata.

I. Ekonomi Kreatif

Pemanfaatan potensi unggulan daerah merupakan upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Produk unggulan daerah baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya local, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintahan yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan dengan merencanakan pengembangan ekonomi kreatif belum maksimal, sedangkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa dalam pengembangannya terlihat bahwa pelaku ekonomi kreatif belum optimal hal ini disebabkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam peningkatan usahanya tidak berjalan dengan baik.

2. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Biak dalam Prespektif Pelayanan Publik.

a. Memberikan Motivasi Kepada Pengusaha.

Berbicara mengenai strategi pengembangan dalam prespektif pelayanan publik sangat penting dikaji dalam pariwisata, karena

itu merupakan salah satu titik awal untuk melakukan pengembangan yang akan dilakukan kedepan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu permasalahan-permasalahan yang akan terjadi harus dicarikan strategi pengembangan yang efektif untuk mendapatkan daya tarik wisata di kabupaten Biak Numfor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi pengembangan pariwisata dalam prespektif pelayanan publik dilakukan dengan pendekatan pengembangan Usaha-usaha seperti pelaksana penyedia jasa seperti hotel, rumah makan dan yang lain terlibat tersebut dalam pelaksanaannya masih terkendala dan belum maksimal ini disebabkan karena kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki belum tercapai sesuai yang diharapkan, disamping itu sistem pendataan yang dilakukan belum terstruktur secara efisien dan efektif. hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni a) Kurangnya data, konsep dan evaluasi terhadap pelaksana program, b) Terbatasnya sumberdaya manusia pelaku usaha dan jasa wisata, c) Belum maksimalnya kerjasama kemitraan dalam pengembangan pariwisata.

b. Promosi Objek Wisata

Jika kita melihat di kabupaten Biak numfor secara keseluruhan pengembangannya belum terlihat maksimal, seperti promosi wisata

yang dilakukan masih bersifat lokal belum melakukan promosi wisata secara nasional sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam menarik daya wisatawan untuk melakukan kunjungan ke kabupaten biak numfor. Kemudian jika dilihat dari peranan stakeholder yang ada belum maksimal hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang dimiliki belum memadai, seperti pemahaman masyarakat dalam memberikan promosi wisata belum terlihat secara jelas apalagi dalam mengelola objek pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas aplikasi vidio tron di setiap sudut kota di kabupaten biak numfor, hal tersebut menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan belum maksimal. Sehingga informasi yang tersebar terhadap pengunjung atau wisatawan hanya sebatas informasi tidak langsung atau informasi dari masyarakat saja yang ada diwilayah pariwisata tersebut. Kemudian terlihat juga dinas pariwisata hanya fokus pada satu wilayah destinasi pariwisata saja sehingga pengembangan yang dilakukan tidak efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah perlu memikirkan kembali bentuk kerjasama yang dilakukan dalam melakukan pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten biak numfor.

Kajian Hasil penelitian (Ismail, 2020) dengan judul strategi

pengembangan pariwisata Provinsi Papua menunjukkan bahwa pengelolaan obyek wisata alam di Papua pada umumnya masih dikelola secara tradisional dan dikelola masyarakat adat. Salah satu kendala pengembangan wisata di Papua adalah belum tersedianya Rencana Induk Pariwisata Daerah, kurangnya promosi wisata alam dan budaya, tingginya migrasi ke Papua, serta kondisi keamanan yang belum stabil. Adapun kegiatan wisata tahunan hanya kegiatan rutinitas dan belum memberikan dampak ekonomi (efek berganda). Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan potensi wisata alam supaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan terjaganya iklim pariwisata yang kondusif.

C. KESIMPULAN

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Biak dalam Prespektif Pelayanan Publik belum maksimal, hal ini disebabkan model pengembangan yang diterapkan kurang efektif dalam mengelola dan mengembangkan objek pariwisata yang ada, disamping itu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat belum terlihat secara kolektif sehingga komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kurang optimal. Bentuk pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh dinas pariwisata belum maksimal. Hal ini terlihat karena model atau bentuk yang dilakukan adalah model kolaboratif tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh dinas pariwisata kepada pengusaha dan masyarakat. Kurangnya ketersediaan

anggaran dalam memenuhi Sarana dan prasarana seperti infrastruktur, acomodasi, transportasi, Shouvenir Shop, Pengembangan SDM, Ekonomi Kreatif sehingga dapat mempengaruhi pelayanan publik terhadap wisatawan lokal maupun luar negeri untuk datang berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor. Serta Belum tersedianya regulasi atau aturan yang membahas tentang pengembangan pariwisata secara komperehensif di kabupaten biak sebagai acuan dalam pelayanan publik yang membahas dan fokus tentang pengembangan pariwisata alam dan bahari.

Sedangkan strategi pengembangan yang dilakukan oleh dinas pariwisata belum optimal hal ini terlihat motivasi kepada pengusaha tidak berjalan dengan baik karena sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan masih minim, kemudian promosi objek wisata yang dilakukan hanya wilayah lokal saja sehingga informasi tidak tersebar dengan efektif secara skala nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agustina, T. . dkk. (2016). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Trikora 2 dan 4 di Kabupaten Bintan*. Naskah Publikasi: Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjungpinang.
- Alim Sumarno. (2012). *Perbedaan Penelitian dan Pengembangan*.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ervina. (2017). Penerapan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 5(3), 6240–6254. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/JURNAL\(07-20-17-02-14-18\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/JURNAL(07-20-17-02-14-18).pdf)
- Flo, E. (2018). *Promosi Wisata Papua, Gempi Siap Gebrak Media Sosial*. <https://merahputih.com/post/read/promosi-wisata-papua-gempi-siap-gebrak-media-sosial>
- Ghony, M. ., & Almanshur, F. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ismail, M. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Papua. *Miatra Pembaharuan : Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.59-69>
- Itamar, H., Alam, A. ., & Rahmatullah, R. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 91–108. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1248>
- Miles M.B, & Huberman A.M. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pramadany, S. . (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135–143.

- <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/126/110>
- Rijal. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamboras Di Desa Tamboras Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 557–572.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/issue/view/376>
- Rusyidi, B., & Fedriyansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.
<http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20490>
- Rusyidi, B., & Pratiwi, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Perempuan Warga Binaan Lembaga Permasalahannya Terhadap Isu Gender. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–15.
<http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/view/16705/pdf>
- Subardin, F. N., Firmansyah, & Priyandoko. (2010). *Penentuan Prioritas Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Lebak*.
<http://repository.unpas.ac.id/32088/>
- Swarbrooke. (1996). *Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya. Jakarta. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002.